LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN PATIANROWO

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patianrowo telah dapat kami susun. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang ada di kecamatan Patianrowo.

Dalam penyusunan LKjIP ini, SKPD Kecamatan Patianrowo tidak terlepas dari rencana strategis yang telah tersusun dan merupakan pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Selanjutnya guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, disusun LKjIP yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patianrowo selama tahun 2025 yang memuat uraian, sasaran-sasaran, target, realisasi dan tingkat pencapaiannya.

Akhirnya semoga LKjIP Kecamatan Patianrowo tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta dapat meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

CAMAT PATIANROWO

RI HATMANTO WIDOWO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19790908 201101 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi

1.4. Isu Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Iktisar/Ringkaran Renstra/Renja

2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Restra

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/ Kabupaten yang Berbatasn)

A.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan

4.2. Saran

LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama
3. Dokumen Penganggaran
4. Print Out E Sukma hasil IKM
5. Gangguan Trantibum Tahun 2024 dan 2025
6. Jumlah Desa Tertib Administrasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Patianrowo bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Patianrowo merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggung - jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi - instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 LANDASAN HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

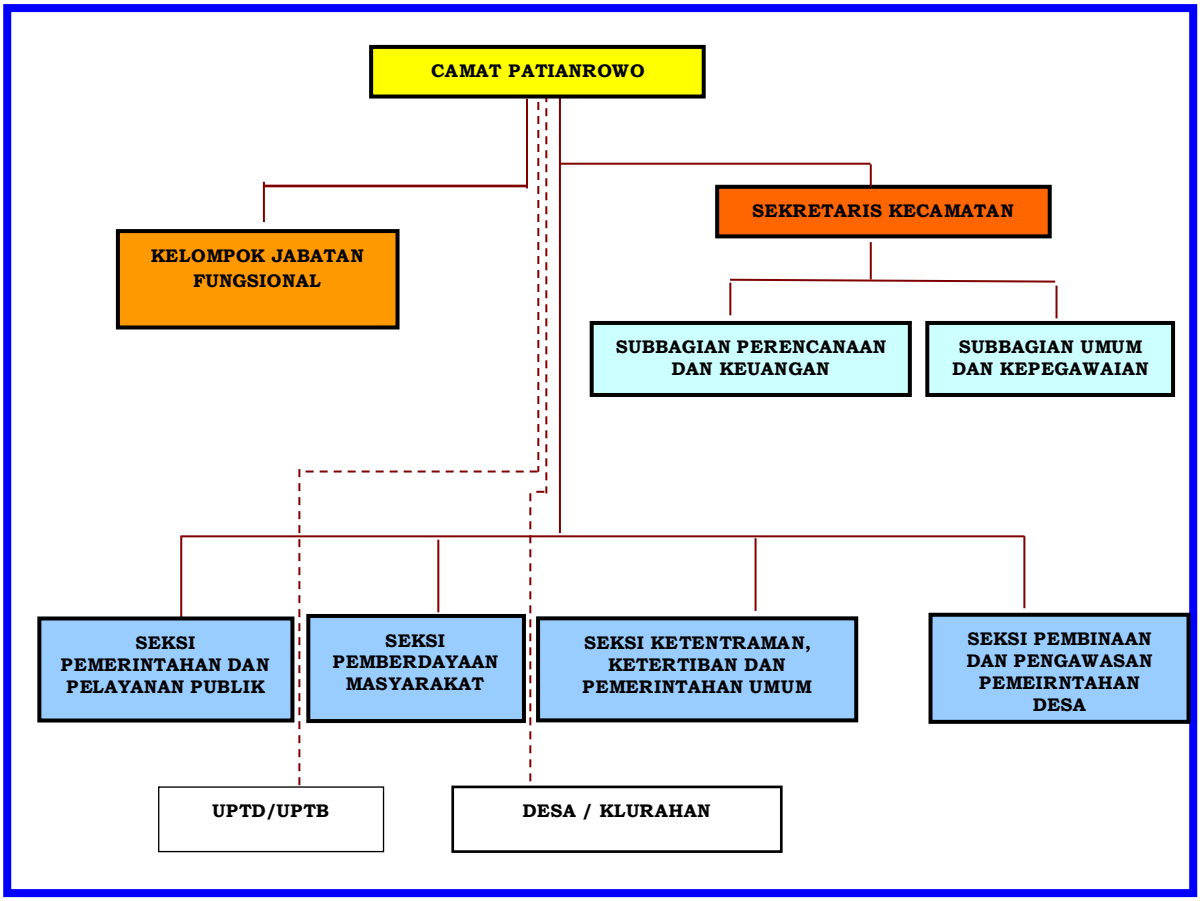
19 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

19.1 STUKTUR ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI

19.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau
7. instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
8. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patianrowo adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 6 (enam), dan semua telah terisi oleh pejabat sesuai dengan kopentansi masing-masing dan dibantu oleh 3 (pelaksana) orang pelaksana dan 4 orang tenaga Non ASN Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi	1	1	2
4	Kasubbag	1	0	1
5	Pelaksana/ASN	5	2	7
Jumlah		9	3	12

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Patianrowo sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	0		0
2.	Pembina	IV/a	0		0
3.	Penata Tingkat I	III/d	3	1	4
4.	Penata	III/ b	1		1
5.	Penata Muda Tk. I	III/a	1	1	2
6.	Penata Muda	II/d	2		2
7.	Pengatur TK I	II/c	1		1
8.	Pengatur	II/b	0		0
9.	Pengatur Muda	II/a	1	1	2
Jumlah			9	3	12

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	0		0
2	S1	4	2	6
3	D3	0		0
4	SMA	5	1	6
JUMLAH		9	3	12

1.4 Isu isu Strategis (strategic issud) yang sedang dihadapi Organisasi

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Patianrowo, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.*
   Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*
   Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima.*
   Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
   Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada 34 pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Patianrowo guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;

1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi; dan

1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan

2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi;

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional;

3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya;
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.2. Realisasi Anggaran.
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

Kecamatan Patianrowo sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yaitu

1. *NGANJUK AKUNTABEL*

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birikrasi
Sasaran	:	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	Indeks Pelayanan Publik

2, *NGANJUK HARMONIS*

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran	:	Meningkatnya penanganan konflik sosial serta ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut

Tujuan : Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator : Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN), Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Patianrowo

Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target tahun 2025. Dalam perubahan dari RPD 2024-2026 ke RPJMD tahun 2025-2029 terjadi perubahan dalam tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam IKU Kecamatan Patianrowo. Yang semula tujuan tidak menjadi IKU pada RPD, namun dalam perubahan RPJMD tujuan menjadi IKU Kecamatan Patianrowo.

Kecamatan Patianrowo sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat

b. Misi

Misi ke1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban

Tujuan :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran

Sasaran :

Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat

Indikator Kinerja :

1. Indeks Kesalehan Sosial
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas

Misi ke 2 :

Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan public

Indikator Kinerja :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

Misi ke 4 :

Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya Manusia yag berkualitas

Tujuan :

Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

Sasaran :

Meningkatnya kemandirian desa

Indikator Kinerja :

1. Tingkat Kemiskinan
2. Indeks Desa

Sedangkan Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan,
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan,
3. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Berdasarkan Renstran 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik di Kecamatan
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

2.2.a. Perjanjian Kinerja sesuai dengan renstra 2024-2026

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.2.a
Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	92
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	10 %

	Program	**Anggaran (Rp)**	**Keterangan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.086.594.185	APBD TA.2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.769.500	APBD TA.2025
3.	Program Pemberdayaan Ketentraman Desa dan Kelurahan	62.610.300	APBD TA.2025
4.	Program Pemberdayaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.697.800	APBD TA.2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.951.000	APBD TA.2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.050.000	APBD TA.2025

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3.416.672.785,00 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp3.322.977.550,00.

2.2.b. Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan renstra 2025-2029

Dalam perubahan dari RPD ke RPJMD terjadi perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo 2025 disusun berdasar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri sartu tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan publik di Kecamatan
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
4. Meningkatnya tertib Adaministrasi Desa

Tabel 2.2.b
Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	77
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	92
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	100

	Program	**Anggaran (Rp)**	**Keterangan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.181.781.992	PAPBD TA.2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.921.700	PAPBD TA.2025
3.	Program Pemberdayaan Ketentraman Desa dan Kelurahan	44.619.750	PAPBD TA.2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.348.350	PAPBD TA.2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.319.500	PAPBD TA.2025

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.875.000	PAPBD TA.2025

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3.416.672.785,00 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp3.412.866.292,00.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan pada Lampiran 1
DPA dan DPPA Kecamatan Patianrowo pada Lampiran 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Patianrowo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Patianrowo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan persyaratan mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 berdasarkan renstra 2024-2026, rumus yang dipergunakan adalah :

1. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) kepada Masyrakat

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

Dalam perubahan RPD menjadi RPJMD dalam menentukan dan mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 berdasarkan renstra 2025-2029, rumus yang dipergunakan adalah :

1. Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

3. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

4. Sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Desa

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Patianrowo menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

No.	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91 %	Tercapai
2	80 % ≤ 90 %	Tercapai dengan cacatan
3	< 80 %	Tidak tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	92	96,58	104,97%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		10 %	33,33%	333,3%
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	77	84,44	109,66
2.	Meningkatynya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		92	96,41	104,79%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		10%	33,33%	333,3%
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa		100%	81,18%	81,18%

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026 bahwa :

A. Sasaran strategis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar pada tahun 2025 triwulan I Kecamatan Patianrowo memperoleh 98,77 dari target 92, sehingga capaiannya sebesar 107,36, Pada Triwulan II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo memperoleh 94,92 dari target 92, sehingga capaiannya sebesar 103,17, Pada Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo memperoleh 93,17 dari Target 92 sehingga capaiannya sebesar 101,27. Dapat disimpulkan bahwa dari Triwulan I, II, III sudah melebihi target.

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 96,58 dari target sebesar 92,00 dari 1.140 responden. Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Patianrowo melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 94,78.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Patianrowo sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 96,13.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 95,00.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Patianrowo tidak dikenakan biaya/gratis terealisasi 99,98.
5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Patianrowo antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran

b. Pembuatan Kartu Keluarga
c. Perekaman KTP
d. Pelayanan Pindah tempat
e. Pembuatan dispensasi nikah
f. Pembuatan PPAT
g. Pelayanan Hak Waris
h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
i. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 95,41.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)
   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 95,73.
7. Perilaku Pelaksana (U7)
   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 97,86.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 99,93.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Patianrowo sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 94,45.

   Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) orang.

Dari hasil dari e sukma Realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Patianrowo sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut :

No	Pereode Waktu	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	TW I	394	98,77	99,49	99,43	99,75	100	99,56	99,81	100	100	99,87	A	Sangat Baik
2	TW II	373	94,92	94,17	93,57	93,77	99,93	94,57	95,84	96,45	99,80	94,84	A	Sangat Baik
3	TW III	373	93,17	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,63	A	Sangat Baik
	IKM Th 2025	**1140**	**96,58**	**94,78**	**96,13**	**95,00**	**99,98**	**95,41**	**95,73**	**97,86**	**99,93**	**94,45**	**A**	**Sangat Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Dari tabel indeks Kepuasan Kecamatan Patianrowo di peroleh kesimpulan bahwa Realisai Kinerja sebesar 96,58 dari target di Tahun 2025 sebesar 92 Sehingga diperoleh Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \% = \frac{96{,}58}{92} \times 100\ \% = 104{,}97\%$$

Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Patianrowo sampai TW III tahun 2025 dari target 92 terealisasi 96,58 dan dengan capaian kinerja 104,97% sehingga termasuk kategori predikat mutu pelayanan A dan kinerja Sangat baik.

Bukti dukung di Lampiran 4

B. Sasaran startegis yang kedua yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan realisasi sebesar 33,33% dari target sebesar 10%. Capaian kinerjanya 333,3% Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 6 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 4 Laporan pada triwulan I, II dan III gangguan trantibum.

Dengan demikian realisali Kinerjanya :

$$\frac{6 - 4 = 2}{6} \times 100 = 33{,}33\%$$

Sedangkan Capaiannya $= \frac{\text{realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{33{,}33}{10} \times 100 = 333{,}3\%$

Capaian kinerjanya sudah tercapai pada triwulan I,II dan III namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Patianrowo bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja terlalu tinggi. Untuk kedepannya akan di lakukan lagi terkait target yang terlalu kecil pada dokumen perencanaan.

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan berdasarkan RPJMD/Renstra 2025-2029 bahwa :

A. Tujuan Kecamatan Patianrowo Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Dari penilaian sinergitas kecamatan terealisasi 84,44 dari target sebesar 77 capaian kinerja sebesar 109,66. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah melebihi mencapai target. Dalam penilaian sinergitas tersebut terdapat 7 aspek, diantaranya sebagai berikjut :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun 2025 dari 7 aspek tersebut ada salah satu aspek yang tidak mendapat nilai kurang pada aspek nomer 5, karena kecamatan patianrowo pada tahun 2025 hanya memiliki inovasi/kreativitas sehingga mempengaruhi hasil nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK). Dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Evaluasi Kinerja Administrasi dan Manajerial Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Hari Senin Tanggal 26 Januari 2026 dengan ini dapat dikatakan bahwa target telah tercapai, namun dari segi capaian kinerja kategori predikat sangat tinggi. Data dukung dituangkan dalam Berita Acara penilaian sebagaimana terlampir.

NO.	KECAMATAN	Sistem Informasi Kec.	PERINGKAT
1.	Sukomoro	92,31	1
2.	Jatikalen	90,62	2
3.	Ngetos	89,97	3
4.	Prambon	88,21	4
5.	Ngluyu	86,31	5
6.	Nganjuk	86,07	6
7.	Tanjunganom	85,27	7
8.	Sawahan	85,12	8
9.	Bagor	85,04	9
10.	Patianrowo	84,44	10
11.	Kertosono	83,93	11
12.	Wilangan	81,91	12
13.	Loceret	81,14	13
14.	Lengkong	80,92	14
15.	Berbek	79,95	15
16.	Baron	78,64	16
17.	Rejoso	78,14	17
18.	Gondang	75,22	18
19.	Ngronggot	73,36	19
20.	Pace	68,88	20

A. Sasaran strategis yang kesatu

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terealisasi sebesar pada tahun 2025 triwulan I Kecamatan Patianrowo memperoleh 98,77 dari target 92, sehingga capaiannya sebesar 107,36, Pada Triwulan II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo memperoleh 94,92 dari target 92, sehingga capaiannya sebesar 103,17, Pada Triwulan III Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo memperoleh 93,17 dari Target 92 sehingga capaiannya sebesar 101,27 dan pada Triwulan IV Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo memperoleh 95,87 dari target 92 sehingga capaiannya sebesar 104,20. Dapat disimpulkan bahwa dari Triwulan I, II, III dan IV sudah melebihi target.

Indek Kepuasan Masyarakat sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 96,41 dari target sebesar 92 dengan jumlah 1.395 responden. Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Patianrowo melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 94,66.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Patianrowo sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 95,55.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 94,83.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Patianrowo tidak dikenakan biaya/gratis terealisasi 99,96.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Patianrowo antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 95,18.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 95,62.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 97,24.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 99,93.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Patianrowo sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 94,68.

   Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak 1.395 (seribu tiga ratus Sembilan puluh lima) orang.

   Dari hasil dari e sukma Realisasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM) Kecamatan Patianrowo sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Pereode Waktu	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	TW I	394	98,77	99,49	99,43	99,75	100	99,56	99,81	100	100	99,87	A	Sangat Baik
2	TW II	373	94,92	94,17	93,57	93,77	99,93	94,57	95,84	96,45	99,80	94,84	A	Sangat Baik
3	TW III	373	93,17	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,63	A	Sangat Baik
4	TW IV	255	95,87	94,31	93,82	94,31	99,90	94,51	95,29	95,39	99,90	95,39	A	Sangat Baik
	IKM Th 2025	**1.395**	**96,41**	**94,66**	**95,55**	**94,83**	**99,96**	**95,18**	**95,62**	**97,24**	**99,93**	**94,68**	**A**	**Sangat Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Dari tabel indeks Kepuasan Kecamatan Patianrowo diperoleh kesimpulan bahwa Realisai Kinerja sebesar 96,41 dari target di Tahun 2025 sebesar 92

Sehingga diperoleh Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \% = \frac{96{,}41}{92} \times 100\ \% = 104{,}79\ \%$$

Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Patianrowo sampai akhir tahun 2025 dari target 92 terealisasi 96,41 dan cpaian kinerja 104,79 sehingga termasuk kategori predikat mutu pelayanan A dan kinerja Sangat baik.

C. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan realisasi sebesar 33,33% dari target sebesar 10% dan Capaian kinerjanya 333,3%. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 6 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 4 Laporan

Dengan demikian realisasi Kinerjanya :

$$\frac{6 - 4 = 2}{6} \times 100 = 33{,}33\ \%$$

Sedangkan Capaiannya $= \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{33{,}33}{10} \times 100 = 333{,}3\%$

Capaian kinerjanya sudah tercapai namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Patianrowo bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja terlalu tinggi. Untuk kedepannya akan dilakukan lagi evaluasi terkait target yang ada pada dokumen perencanaan. Data kejadian sebagaimana tersebut dibawah ini :

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

RESOR NGANJUK

DATA LAPORAN KEJADIAN POLSEK PATIANROWO JANUARI S/D DESEMBER 2025

NO	NO LP DAN TANGGAL	KRONOLOGIS KASUS	PELAPOR	TINDAK PIDANA	FOTO TKP
1	Nomor : LP/B/ 01 /IV/2025/SPKT/POLSEK PATIANROWO/POLRES NGANJUK/POLDA JATIM, tanggal 05 April 2025	Awal mula Pelapor pulang dari kerja sekira pukul 23.00 Wib digudang penyembelihan ayam di Ds. Bukur, selanjutnnya Pelapor dan Sdr. RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI (korban 2) bersama rekan2nya nyangkruk dirumah saudara RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI di Dsn. Gilig Ds. Rowomarto, Kec. Patianrowo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 03.00 wib, Pelapor (korban 1) dan saudara RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI (korban 2) membubarkan diri selanjutnya pelapor dan Sdr. RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI mengantarkan temannya di Baron dengan mengendarai sepeda motor Honda scupy berboncengan dengan saudara RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI dan setelah sampai Baron, pelapor dan Sdr. RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI. kemudian kembali saat dalam perjalanan di jalan Raya Patianrowo Lengkong tepatnya Jalan raya Dsn. Balong doro Ds. Babatan Kec. Patianrowo sekira pukul 03.30 wib kendaraan yang dinaiki Pelapor dan Sdr. RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI korban dipepet pengendara sepeda motor bebek berboncengan dua, yang belakang membawa pisau belati yang langsung dibacokan	DIMAS AMIN PRATAMA, laki-laki, Nganjuk, 27 Januari 1998, Dsn. Gilig Rt. 001 Rw. 004 Ds. Rowomarto Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk.	Penganiayaan pasal 170 KUHP Jo pasal 351 KUHP (PERKARA DITANGANI POLRES NGANJUK)	 

		ke ke punggung saudara RAHMAD AGUNG EKO ISWAYUDI dan kemudian membacok Pelapor mengenai lengan kanan, dan pelaku langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ke arah utara, dan korban langsung putar balik kearah pukesmas Patianrowo, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patianrowo guna proses hukum lebih lanjut			
2	Nomor : LP/B/ 02 /IV/2025/SPKT/POLSEK PATIANROWO/POLRES NGANJUK/POLDA JATIM, tanggal 25 Apil 2025.	Awalmula yaitu pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, sekira pukul 21.00 Wib, korban saat berada di rumah Dsn. Pecuk Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pecuk Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk didatangi oleh teman temanya yang bernama Sdr. DICKI, sdr. RIYAN dan saudara ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI) mengajak keluar di rumah saudara RIYAN namun saat itu korban tidak mau dan korban nganjak ngobrol didepan rumahnya saja, namun saat itu Sdr. DICKI, sdr. RIYAN dan saudara ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI) keluar dulu membeli minuman arak dan selang beberapa saat ketiga temannnya tersebut kembali lalu korban bersama teman – temannya minum bersama dan kemudian datang saudara M. FATKUROSI (ROJI), dan datang lagi teman teman korban yaitu saudara ADIN, Sdr. M. WAHIDDUR RASYID, Sdr. ARDIAN dan saat itu korban posisi duduk di kursi teras rumah langsung oleh Sdr. RIYAN ditannya “ Mas HPne om black sing ilang iku kronologinne piye “ dan di jawab korban “ aku ngak ruh RI wong aku jek turu “ dan saat itu teman teman korban yang dilokasi bergantian menayai korban, dan	**RIZAL AMIRUDIN, laki-laki,** Nganjuk, 15 Mei 2000, Dsn. Pecuk Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pecuk Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk.	Pengroyokan pasal 170 KUHP (PERKARA DITANGAN POLRES NGANJUK)	

		saat itu Sdr. ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), mengatakan kepada korban " lakok jenenge bapakku mbok gowo " dan dijawab korban " aku ngak gowo mok takok njaluk tulung " dan saat itu Sdr. ROJI mengatakan kepada korban " lo aku mok arani barang " kemudian saat itu korban mengatakan kepada Sdr. M. FATKUROSI (ROJI) " aku ngak ngarani aku mok takok soale aku mari oleh omongan tekok Pak SAFAAT kon tekok awakmu " dan saat itu Sdr. M. FATKUROSI (ROJI)mengatakan " we podo karo ngarani aku " dan di jawab korban " yo sepurane aku bukan ngarani, aku kan yo oleh info kon tahkok kene nak awakmu nak aku ngak oleh info aku ngak kiro moro nok omah mu " kemudian saat itu Sdr. ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), mengatakan " podo ae mencemarkan nama baik bapakku " dan di jawab korban " opo aku tak jaluk sepuro bapakmu langsung ben podo padange " dan saat itu Sekira pukul 23.00 Wib di hari yang sama saat itu ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), yang posisi duduk di kursi samping korban langsung berdiri dan memukul bagian mata sebellah kanan satu kali, dan saat itu Sdr. M. FATKUROSI (ROJI) mengatakan " la terus ngeneiki piye jenengku yo katut elek " di balas korban " ora ZI berita iki gung onk sing krungusoalle sing ruh mok golonganne dewe tok " dan Sdr. M. FATKUROSI (ROJI) mengatakan " la lak enek sing krungu piye wiie " dan dijawab korban " ora – ora ogak enek " dan kemudian saat itu Sdr. ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), mengatakan " wes ngomong ae ben dang bar " dan saat itu Sdr. M.		

		FATKUROSI (ROJI) yang berada di samping korban langsung berdiri dan memukul pipi kiri korban dan kemudian Sdr. M. FATKUROSI (ROJI) kembali kesamping korban, kemudian saat itu Sdr. ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), kembali mengatakan " bapakku aslinne ngerti HP kuwe neng ngendi wes ndang omongo ae " dan di jawab korban " yo saiki ae bapakmu dijak jipuk HPne posisine nek endi " dan langsung oleh saudara ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), korban dipukul bagian mata kiri kemudian jaket bagian belakang ditarik kedepan dengan posisi korban hingga membukuk dan kemudian punggung belakang dipukuli dan muka korban ditendangi dengan lutut saudara ADMAD RAHMAN ILHAM SYAFAAT (ARI), sebannyak tiga kali kemudian saat itu dilerai oleh Sdr. ADIN dan di ajak pulang dan Sdr. M. FATKUROSI (ROJI) juga mengikutinya, dari kejadian tersebut korban mengalami luka lebam / memar pada bagian mata kiri dan kanan seta rahang terasa nyeri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patianrowo guna proses hukum lebih lanjut.			
3	LP/B/ 03 /V/2025/SPKT/POLSEK PATIANROWO/POLRES NGANJUK/POLDA JATIM, 09 Mei 2025.	Awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 April 2025, sekira pukul 01.00 Wib sewaktu korban akan pulang ke kerumah lewat jalan raya pandantoyo dengan mengendarai sepeda motor tepatnnya dekat taman Desa Pandantoyo korban diteriaki " woi dancok mandeko " dan saat itu korban hanya	**DAVIT ADIT SETIAWAN, laki-laki,** Nganjuk, 14 Juli 2004, alamat Jl. IR Sukarno Rt. 002 Rw. 004 Ds. Pisang	Membawa memiliki senjata tajam jenis parang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951. (PERKARA	

		menoleh saja dan tidak menghiraukan teriakan tersebut dan langsung pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah kakak korban saudara VIKI PUTRA RAMADANI yang saat itu belum tidur dan kemudian kejadian tersebut di ceritakan ke saudara VIKI PUTRA RAMADANI dan langsung berangkat dengan temannya saudara IMAM ZAINI dengan mengendarai sepeda motor dan mengetahui hal tersebut saat itu korban langsung mengikuti bersama saudara PUTRA dan saudara INDRA menuju ke Pandantoyo tepatnya di taman, dan saat itu orang yang meneriaki langsung oleh kakak korban saudara VIKI PUTRA RAMADANI dan saudara IMAM ZAINI dipukulinnya dan korban berupaya melerai kejadian tersebut, kemudian saat saudara RICO (korban pemukulan) mengatakan " entenono kene dancok " kemudian meninggalkan lokasi kearah utara, dan saat itu korban meminta maaf kepada teman – teman dari saudara RICO, dan korban berserta kakak nya dan rombongan kembali ke depan pos kampling Desa pisang, dan selang beberapa saat setelah korban dan kakaknya beserta rekan – rekan berada di depan pos kampling desa pisang, saudara RICO dan saudara CELO datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam berboncengan dengan membawa senjata tajam jenis parang dan motornnya langsung dihentikan di depan poskamling, dan saat itu saudara RICO turun sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan bertannya kepada rombongan korban " mas ngerti sing ngamplengi aku opo ngak lak ngerti	Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk,	DITANGANI POLRES).	

		arep tak bacoi deloken mas lambeku bocor “ dan saat itu langsung korban jawab karena korban takut di jawab “ ngaler ngaler mas “ kemudian saat itu saudara RICO langsung naik sepeda motor langi sambil mengayun ngayunkan parangnya keaspal pergi kearah barat dan saudara CELO juga membawa parang sambil menyetir sepeda motornnya. Setelah itu korban dan kakak maupun rekan rekan korban dari kejadian tersebut merasa ketakutan membubarkan diri pulang., selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patianrowo guna proses hukum lebih lanjut.			
4	LP/B/04/VII/2025/SPKT/ POLSEK PATIANROWO/ POLRES NGANJUK/ POLDA JATIM,tanggal 27 Juli 2025.	Awal mula yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 22.00 Wib, sewaktu pelapor dan saksi 1 berada di rumah di Dsn. Ngrengket Rt. 007 Rw. 002 Ds. Rowomarto Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk, didatangi seorang laki- laki yang bernama ZABUNG yang masih saudara yang saat itu diatar oleh saudara MUSDI (saksi 2) dan kemudian setelah mengantar ke rumah pelapor saksi 2 meninggalkan saudara ZABUNG kerumah pelapor, dan saat berada dirumah pelapor Sdr. ZABUNG ngobrol dengan pelapor hingga larut malam sampai pukul 24.00 Wib, dan kemudian saat itu oleh pelapor karena sudah mengatuk di tinggal tidur di dalam kamar sedangkan Sdr. ZABUNG masih melihat TV diruang keluarga, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025, sekira pukul 03.00 Wib, sewaktu saksi 1 bagun tidur	MOCH. YUSUF, laki-laki, Nganjuk, 19 Agustus 1989, alamat Dsn. Ngrengket Rt. 007 Rw. 002 Ds. Rowomarto Kec. Patianrowo kab. Nganjuk.	Pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP. (PERKARA DITANGANI POLRES).	

		dan keluar kamar melihat pintu dapur terbuka dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AG 4072 WE, warna coklat Tahun 2019, noka : MH1JM5111KK270577 Nosin : JM51E1270336 yang sebelumnnya diparkir didapur sudah tidak ada. (hilang) dan saudara ZABUNG di cek di kamar juga tidak ada, kemudian saksi 1 berupaya menghubungi saudarannya yang berada di lengkong menanyakan keberadaan saudara ZABUNG ternyata selama ini saudara ZABUNG banyak yang mencarinya terkait permasalahan sepeda motor, kemudian dari kejadian tersebut selanjutnnya melaporkan ke Polsek patiamnrowo. Dari kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).			

B. Sasaran strategis yang ketiga yaitu meningkatnya tertib Administrasi Desa realisasi sebesar 81,18% dari target sebesar 100% dan Capaian kinerjanya 81,18%. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut belum mencapai target.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan Tertib Administrasi Desa Tahun 2025 sebanyak 9 Desa yang mengisi buku administrasi lengkap dan 2 Desa yang belum lengkap untuk mengisi buku administrasi,dengan demikian realisasi kinerjanya :

$\frac{9}{11}$ X 100% = 81,18 %

Sehingga Realisasinya = 81,18 %

Sedangkan Capaian Kinerjanya = $\frac{81,18}{100}$ x 100%= 81,18%

Dasar perhitungan realisasi kinerja sasaran ketiga dilihat dari :

REKAITULASI LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025

KECAMATAN PATIANROWO

No	Jenis Buku Administrasi Pemerintahan Desa		Desa Yang Mengisi Buku Administrasi Pemerintahan Desa		Ket
1	2		3		4
I	**BUKU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		Diisi Tidak Lengkap	Diisi Lengkap	
	Administrasi Umum (A)				
	1	Buku Peraturan Di Desa (A1)	1. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10. Lestari	
	2	Buku Keputusan Kepala Desa (A2)	1. Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Rowomarto 10. Lestari	

	3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa (A3)	-	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10.Rowomarto 11. Lestari	
	4	Buku Aparat Pemerintah Desa (A4)	1.Ngepung 2. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
	5	Buku Tanah Kas Desa (A5)	1. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Ngepung	
	6	Buku Tanah di Desa (A6)	1.Ngepung 2.Rowomarto 3.Lestari	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8. Tirtobinangun	
	7	Buku Agenda (A7)	1.Ngepung 2.Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
	8	Buku Ekspedisi (A8)	1. Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari 10. Rowomarto	
	9	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa (A9)	1.Ngrombot 2.Patianrowo 3.Rowomarto 4.Tirtobinangun 5.Lestari 6. Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Pecuk 4.Pakuncen 5. Babadan	
	Administrasi Umum (B)				

	1	Buku Induk Penduduk (B1)	-	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10.Rowomarto 11. Lestari	
	2	Buku Mutasi Penduduk Desa (B2)	-	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10.Rowomarto 11. Lestari	
	3	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk (B3)	-	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10.Rowomarto 11. Lestari	
	4	Buku Penduduk Sementara (B4)	1.Ngrombot 2.Patianrowo 3.Rowomarto 4.Tirtobinangun 5.Lestari 6.Ngepung 7. Babadan	1.Bukur 2.Pisang 3.Pecuk 4. Pakuncen	
	5	Buku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Kartu Keluarga (KK) (B5)	-	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Ngepung 10.Rowomarto 11.Lestari	
	Administrasi Keuangan (C)				
	1	Buku APBDes (C1)	1. Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari 10. Rowomarto	

	2	Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) (C2)	1.Ngepung 2. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
	3	Buku Kas Pembantu Kegiatan (C3)	1. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari 10. Ngepung	
	4	Buku Kas Umum (C4)	1.Ngepung 2. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
	5	Buku Kas Pembantu (C5)	1.Ngepung 2. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
	6	Buku Bank Desa (C6)	1. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari 10. Ngepung	
	Administrasi Pembangunan (D)				
	1	Buku Rencana Kerja Pembangunan (D1)	1.Ngepung 2. Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	

	2	Buku Kegiatan Pembangunan (D2)	1.Ngepung 2.Rowomarto 3.Patianrowo	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Lestari 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8. Tirtobinangun	
	3	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan (D3)	1. Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari 10. Rowomarto	
	4	Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (D4)	1.Ngepung 2.Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9. Lestari	
II	**Administrasi Lainnya**				
	1	Buku BPD	1.Ngepung 2.Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari	
	2	Buku Musyawarah Desa	1.Ngepung 2.Rowomarto	1.Bukur 2.Pisang 3.Babadan 4.Pecuk 5.Patianrowo 6.Pakuncen 7.Ngrombot 8.Tirtobinangun 9.Lestari	
	3	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Adat	1.Ngrombot 2.Patianrowo 3.Rowomarto 4.Tirtobinangun 5.Lestari 6.Ngepung	1.Bukur 2.Pisang 3.Pecuk 4.Pakuncen 5.Babadan	

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa desa dikatakan tertib administrasi apabila buku-buku administrasi sudah terisi ≥ 80% baru bisa dikatakan tertib administrasi.

Dari hasil monitoring desa yang tertib administrasi 9 Desa yang tertib dari 11 Desa. Berikut data desa yang tertib administrasi sebagai berikut :

DATA DESA TERTIB ADMINITRASI
KECAMATAN PATIANROWO

NO.	D E S A	PROSENTASE	KET.
1.	Bukur	100%	Tertib Administrasi
2.	Pisang	100%	Tertib Administrasi
3.	Babadan	96,15%	Tertib Administrasi
4.	Pecuk	100%	Tertib Administrasi
5.	Patianrowo	84,62%	Tertib Administrasi
6.	Pakuncen	100%	Tertib Administrasi
7.	Ngrombot	88,46%	Tertib Administrasi
8.	Tirtobinangun	88,46%	Tertib Administrasi
9.	Ngepung	30,77%	Belum Terib Administrasi
10.	Rowomarto	34,62%	Belum Terib Administrasi
11.	Lestari	84,62%	Tertib Administrasi

Dari Capaian 81,18 % termasuk kategori kreteria tercapai dengan catatan, sehingga capaian kinerjanya dan belum tercapai karena masih banyak buku administrasi desa yang tidak di isi dan tidak di isi lengkap, sehingga capaian kinerja menjadi rendah tidak sesuai dengan target. Untuk kedepannya perlu lagi meningkatkan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa dan koordinasi dengan Dinas PMD.

A.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tahun 2024

Tahun 2023 Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indiaktor Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	**Renstra 2018-2023**	86	88	-	-	88,87	87,53	-	-
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	-	-	92	92	-	-	94,64	96,58

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		-	-	10	10	-	-	20	33,33
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggara an Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	-	-	-	77	-	-	-	84,44
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		-	-	-	92	-	-	-	96,41
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		-	-	10	10	-	-	20	33,33
3.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa		-	-	-	100	-	-	-	81,18

Pada table diatas dijelaskan bahwa ada perbedaan indikator kinerja dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya pada dokumen perencanaan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya kecuali indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana dari tahun 2021 sampai 2023 ada kenaikan target dan realisasi, pada tahun 2023 ke tahun 2024 dan 2025 ada kenaikan target namun ada penurunan realisasi Yang disebabkan masyarakat yang menggunakan pelayanan di kecamatan lebih sedikit dari tahun 2023, sehingga yang mengisi Aplikasi e-Sukma mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang meskipun tercapai 100% dari target di tahun 2024 dan 2025.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Renstra						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	92	92	93	-	-	-	-
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		10	10	10	-	-	-	-
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	77	77	78	78	79	79	79
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		92	92	93	93	94	94	94
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		10	10	10	8	8	8	8
3	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa		100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	93	96,58	103,84
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		10	33,33%	333,3%
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	79	84,44	106,88
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		94	96,41	102,56
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		8	33,33%	416,62%
3	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa		100	81,18%	81,18%

Dari table Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

   Realisasi pada tahun 2025 sebesar 96,58 dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 93. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 103,84%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya. Yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{96{,}58}{93} \times 100\ \% = 103{,}84\%$$

   Dalam Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Patianrowo belum dapat terlaksana secara optimal.

   Dengan ini dipandang perlu dan penting Kecamatan Patianrowo kedepannya lebih meningkatkan pelayanan yang respon baik dari masyarakat meningkat, yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma dengan hasil baik sesuai atau melebihi target.

   Kedepannya Kecamatan Patianrowo akan menaikkan target pelayanan publik dengan harapan pelayanan di Kecamatan Patianrowo semakin baik.

3. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

   Realisasi pada renstra 2024-2026 sebesar 33,33% dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 10%. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 333,3%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya. Yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{33{,}33}{10} \times 100\ \% = 333{,}3\%$$

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Indeks Sinergitas Kecamatan

   Realisasi pada tahun 2025 sebesar 84,44 dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 79. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 106,88. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya. yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{84,44}{79} \times 100\ \% = 106,88$$

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

   Realisasi pada tahun 2025 sebesar 96,41 dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 94. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 102,56. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya. Yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{96,41}{94} \times 100\ \% = 102,56$$

   Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Patianrowo belum dapat terlaksana secara optimal.
   Dengan ini dipandang perlu dan penting Kecamatan Patianrowo kedepannya lebih meningkatkan pelayanan yang respon baik dari masyarakat meningkat, yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma dengan hasil baik sesuai atau melebihi target.
   Kedepannya Kecamatan Patianrowo akan menaikkan target pelayanan publik dengan harapan pelayanan di Kecamatan Patianrowo semakin baik.

4. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

   Realisasi pada tahun 2025 sebesar 33,33% dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 10%. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan

tingkat kemajuan 333,3%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya. Yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{33{,}33}{10} \times 100\ \% = 333{,}3\%$$

5. Realiasasi Persentase Desa tertib administrasi desa di wilayah Kecamatan Patianrowo pada tahun 2025 sebesar 81,18% dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 100 % maka tingkat kemajuannya sebesar 81,81%

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{77{,}92}{100} \times 100\ \% = 77{,}92\ \%$$

Tingkat kemajuan desa tertib administrasi belum mencapai target 100% , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini dalam pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi Desa-Desa se Kecamatan Patianrowo belum dapat terlaksana secara optimal.
Dengan ini dipandang perlu dan penting Kecamatan Patianrowo kedepannya lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yang lebih baik lagi sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan didalam dokumen perencanaan.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten Yang Berbatasan)

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional
(berdasarkan RPD 2024-2026)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	*Provinsi Jawa Timur 89,56	96,58	Diatas
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-	83,33%	-

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tingkat Nasional dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Kecamatan Patianrowo tahun 2025 adalah 95,87 dibandingkan dengan rata-rata IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89,56. Kecamatan Patianrowo masih diatas standart Nasional. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal. Kedepannya Kecamatan Patianrowo akan meningkatkan pelayanan sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Patianrowo mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.
2. Realisasi Kinerja sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan dari Tahun 2025 pada renstra 2024-2026 pada sampai dengan triwulan III belum ada data tentang gangguan trantibum diwilayah Kecamatan Patianrowo,

sehingga belum bisa mengetahui berapa besar realisasi kinerjanya. kedepannya lebih insentif untuk Koordianasi dan sosialisasi tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan Patianrowo dengan stikholder terkait.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (n)
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	84,44
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	*Provinsi Jawa Timur 89,56	96,41
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	33,33 %
3	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	-	81,18%

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tingkat Nasional dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Realisasi kinerja Indeks Sinergitas Kecamatan pada tahun 2025 adalah 84,44 dibandingkan dengan nilai rata-rata sinergitas di wilayah Kabupaten Nganjuk sebesar 82,87, Kecamatan Patianrowo masih di atas nilai rata-rata sinergitas Kabupaten Nganjuk. Maka dapat dikatakan Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) sudah optimal.

2. Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Kecamatan Patianrowo tahun 2025 adalah 96,41 dibandingkan dengan rata-rata IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89,56. Kecamatan Patianrowo masih diatas standart Nasional. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal. Kedepannya Kecamatan Patianrowo akan meningkatkan pelayanan sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Patianrowo mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.
3. Realisasi Kinerja sasaran strategis yang kedua Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari Tahun 2025 sebesar 33,33%, dibandingkan dengan Standart Provinsi Jawa Timur tidak ada pembandingnya. Untuk kedepannya akan dikaji ulang tentang penentuan sasaran yang ada di dokumen perencanaan.
4. Realisasi kinerja Persentase Desa tertib administrasi desa pada tahun 2025 sebesar 81,18% dibandingkan dengan Standart Provinsi Jawa Timur tidak ada pembandingnya. Untuk kedepannya akan dikaji ulang tentang penentuan sasaran yang ada di dokumen perencanaan.

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja
Tahun 2025

N0	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	92%	96,58	104,97 %	**Faktor Pendukung :** 1. Digitalisasi Pelayanan Kompetensi Petugas 2. Transparai Biaya dan Prosedur 3. Fasiliatas Sarana dan Prasarana	
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	10%	33,33%	333,3%	**Faktor Pendukung :** - Sinergi dan koordinasi sama lintas sektoral - Dukungan anggaran - Partisipasi Masyarakat	
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	77	84,44	109,66	**Faktor Pendukung :** 1. Dokumen yang di upload pada aplikasi sincan telah dipenuhi semua 2. SDM yang menjalankan aplikasi sincan telah mumpuni	

1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	92	96,41	104,20 %	**Faktor Pendukung :** 1. Digitalisasi Pelayanan Kompetensi Petugas 2. Transparai Biaya dan Prosedur 3. Fasiliatas Sarana dan Prasarana	
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	10%	33,33%	333,30 %	**Faktor Pendukung :** - Sinergi dan koordinasi sama lintas sektoral - Dukungan anggaran - Partisipasi Masyarakat	
3	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	100%	81,18%	81,18%	**Faktor Penghambat** 1. Mutasi Perangkat Desa: Adanya pergantian perangkat desa yang menyebabkan penyesuaian ulang pemahaman administrasi (kurang SDM berpengalaman di desa tertentu). 2. Keterbatasan Sarpras Desa: Masih terdapat beberapa desa yang memiliki keterbatasan sarana prasarana penunjang administrasi digital (internet), terutama di desa pinggiran. 3. Penumpukan Laporan: Adanya kecenderungan penumpukan penyusunan administrasi di akhir triwulan atau akhir tahun, sehingga menghambat ketepatan waktu. 4. Pembinaan dan pengawasan desa kurang maksimal	Alternatif Solusi / Strategi Tindak Lanjut (Tahun 2026) 1. Refresher Course & Pendampingan Spesifik: Mengad akan pelatihan rutin khusus bagi perangkat desa baru dan melakukan pendampingan "jemput bola" ke desa yang masih memiliki nilai administrasi rendah. 2. Optimalisasi Tim Monev Kecamatan: Mela kukan evaluasi berkala secara rutin (bukan hanya formalitas) agar temuan

							sehingga pengisian buku administrasi desa tidak di isi dengan lengkap	kesalahan administrasi dapat segera diperbaiki sebelum akhir tahun anggaran.

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Patianrowo pada tahun 2025 dari target 92 realisasi sebesar 96,58 dengan capaian kinerja 104,97% maka dikatakan dapat tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Patianrowo **"SADIS"**
   a. Santun
   b. Akuntabel
   c. Dedikasi
   d. Ihklas
   e. Senyum

   penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :
   1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
   2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
   3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap
2. Realisasi kinerja Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 pada triwulan III dengan target 10% dan realisasi sebesar 33,33% dengan capaian kinerja 333,3% maka dikatakan tercapai, Adapun penyebab tercapaianya antara lain adalah :
   a. Koordinasi antara tokoh Masyarakat dan Forpimcam sangat bait
   b. Mestikupun keterbatasan SDM Trantibum tetap bisa menekan ganggtuan trantibum diwilayah
   c. Keterbatasan anggaran operasional
   d. Dinamika sosial dan ekonomi Masyarakat

Berdasarkan RPJMD 2025-2029

1. Dalam capaian indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 dari target 77 dan realisasi 84,44 dengan capaian sebesar 109,66 maka bisa dikatakan dapat tercapai.
2. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Patianrowo pada tahun 2024 dari target 92 dan realisasi 96,41 dengan capaian kinerja sebesar 104,79%, maka dikatakan dapat tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Patianrowo **"SADIS"**
   a. Santun
   b. Akuntabel
   c. Dedikasi
   d. Ihklas
   e. Senyum

   penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :
   1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
   2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
   3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap
3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 dari target 10% dan terealisasi sebesar 33,33% dengan capaian kinerja sebesar 333,30% maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai. Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan trantibun di wilayah Kecamatan Patianrowo dikarenakan terciptanya keharmonisan antara Muspika, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Patianrowo supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

4. Realisasi kinerja Persentase Desa tertib administrasi desa di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 81,18 % diperoleh dari target 100% dengan capaian kinerja 81,18% maka dikatakan tidak tercapai, Adapun penyebab ketidaktercapaian/kegagalan antara lain adalah :
   a. Keterbatasan Kapasitas SDM Aparatur Desa
   b. Kurangnya Pembinaan dan Pendampingan
   c. Perubahan Regulasi yang Cepat
   d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Administrasi
   e. Ketidaksesuaian Indikator dan Metode Penilaian

A.6 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	104,97%	44,73%	60,24%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	333,3%	44,73%	288,57%
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	109,66	63,46%	46,20%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	104,79%	63,46%	41,33%

2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase pen urunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	333,3%	63,46%	269,84%
3	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	81,18%	63,46%	17,72%

Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Dari Sasaran Kesatu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian kinerja sebesar 104,97% dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 44,73% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula Prosentase Capaian Kinerja dikurangi dengan Realisasi Anggaran = 104,97% – 44,73% = 60,24%.

   Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi *di* Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

   a) Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Patianrowo tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal, sdehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebib baik lagi;
   b) Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025

2. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 333,3% dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 44,73%. Dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 333,3% - 44,73% = 288,57% menunjukkan sudah adanya komitmen yang mendasar dari Kecamatan Patianrowo, dalam melaksakan kinerja.

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Dari Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan capaian kinerja 109,66% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 63,46% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 109,66% – 63,46% = 46,2%.

   Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

   a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Patianrowo tetap melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan cukup baik dan senantiasa dievaluasi secara rutin dan berkala untuk perbaikan kedepannya;
   b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi PemberdayaanMasyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025;

   Secara umum, pelaksanaan tujuan perangkat daerah dalam meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan menunjukkan kinerja yang efisien, dengan selisih efisiensi sebesar 46,2%, yang mencerminkan penggunaan anggaran yang hemat namun tetap mampu mencapai target kinerja secara semaksimal mungkin.
2. Dari Sasaran Kesatu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 104,79% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 63,36% Sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan Realisasi Anggaran = 104,79% – 63,46% = 41,33%. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

a) Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Patianrowo tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebib baik lagi;

b) Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif dan efisien, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.

3. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Capaian Kinerjanya sebesar 333,3% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 63,46%

   Sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula Capaian Kinerja dikurangi dengan Realisasi Anggaran = 333,3% - 63,46% = 269,84%. Hal ini menunjukkan adanya efisien yang cukup signifikan.

   Interpretasi Hasil :

   1. Capaian kinerja tinggi

      Tingkat capaian kinerja sebesar 333,3% menunjukkan bahwa program/kegiatan telah terlaksana dengan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan.

   2. Realisasi anggaran lebih rendah dari capaian.

      Realisasi anggaran sebesar 63,46% berarti tidak seluruh pagu anggaran digunakan, namun output yang dihasilkan tetap tinggi.

   3. Efisiensi negatif (269,84%)

      Selisih negatif sebesar (269,84%) menunjukkan bahwa kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari proporsi capaian kinerjanya. Artinya, organisasi mampu menghasilkan output yang optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran secara maksimal.

4. Untuk sasaran yang ketiga, Meningkatnya tertib administrasi desa, adapun capaian kinerjanya sebesar 81,18% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 63,46% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 81,18% - 63,46% = 17,72% menunjukkan sudah adanya komitmen yang mendasar dari Kecamatan Patianrowo, dalam melaksakan kinerja, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan komitmen yang lebih baik dan terukur untuk kedepannya.

   Nilai efisiensi sebesar 17,72% (positif) menunjukkan bahwa:

   a) Output/kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan.
   b) Program dinilai sangat efisien, karena dengan serapan anggaran 63,46% mampu menghasilkan capaian 81,18%.
   c) Terdapat nilai tambah (value for money) dalam pelaksanaan program.

A.7 Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Patianrowo sebagaimana table di bawah :

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026			92	96,58	104,97 %
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	**73**	**71,00**	**97,26**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	*12 Dokumen*	*7 Dokumen*	*58,33%*
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*62 Dokumen*	*16 Dokumen*	25,80%

				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*51 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1,96%*
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*7 Dokumen*	*3 Dokumen*	*42,85%*
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*	*14 Unit*	*6 unit*	*42,85%*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*	*24 Laporan*	*20 Laporan*	*83,33%*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*	*12 Unit*	*6 unit*	*50%*
	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**84%**	**64,28%**	**76,52%**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*8 Laporan*	5 Laporan	62,50%

				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*3 Dokumen*	2 Dokumen	66,66%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*3 Laporan*	*2 Laporan*	*66,66%*
	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**86%**	**84,76%**	**98,55%**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	*105 Lembaga Kemasyarakatan*	*89 Lembaga Kemasyarakatan*	*84,76%*
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**67%**	**75%**	**119,94 %**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*8 Laporan*	*6 Laporan*	75%

	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**83%**	**83%**	**100%**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	*250 Orang*	*250 orang*	100%
	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**82%**	**72,72%**	**88,68%**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	*11 Desa*	*8 Desa*	*72,72%*
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029			77	84,44	109,66

	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029			92	95,87	104,20 %
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029			10%	33,33%	333,30 %
	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029			100%	81,18%	81,18%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan	**73**	**71,00**	**97,26%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikthisar OPD yang diaksanakan*	*12 Dokumen*	*11 Dokumen*	*91,66%*
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD*	*62 Dokumen*	*55 Dokumen*	88,70%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*51 Dokumen*	*31 Dokumen*	*60,78%*

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum SKPD*	*7 Dokumen*	*7 Dokumen*	*100%*
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Dearah*	*14 Unit*	*7 unit*	*50%*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*24 Laporan*	*24 Laporan*	*100%*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharan Sarana dan Prasarana Barang Milik daerah*	*12 Unit*	*12 unit*	*100%*
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**84%**	**83,71%**	**99,65%**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*8 Laporan*	8 Laporan	100%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*3 Dokumen*	2 Dokumen	66,66%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang*	*3 Laporan*	*2 Laporan*	*66,66%*

				Diliompahkan Kepada Camat	*Dilimpahkan kepada Camat*			
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**86%**	**84%**	**97,67%**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	*105 Lembaga Kemasyarakatan*	*102 Lembaga Kemasyarakatan*	*97,14%*
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**67%**	**59%**	**88,05%**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*8 Laporan*	*7 Laporan*	87,50%
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**83%**	**83%**	**100%**

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	*250 Orang*	*250 orang*	100%
	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**82%**	**82%**	**100%**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	*11 Desa*	*11 Desa*	*100%*

Adapun program dan kegiatan yang mempengaruhi/menunjang terhadap keberhasilan/kegagalan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 sampai dengan Triwulan III table diatas :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 92 realisasi 96,58 dengan capaian 104,97%

   Program dan kegiatan yang menunjang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator nilai sakip dari target 73 realisasi 71 yang ditunjang oleh kegiatan:
      1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 12 terealisasi 7 dengan capaian kinerja kegiatan 58,30%
      1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 62 terealisasi 16 dengan capaian kinerja kegiatan 25,80%
      1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target 51 terealisasi 1 dengan capaian kinerja kegiatan 1,96%
      1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 7 terealisasi 3 dengan capaian kinerja kegiatan 42,85%
      1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 14 terealisasi 6 dengan capaian kinerja kegiatan 42,85%
      1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 24 terealisasi 20 dengan capaian kinerja kegiatan 83,33%
      1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 12 terealisasi 6 dengan capaian kinerja kegiatan 50%
   2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target 83% teralisai 64,28% dengan capaian kinerja program 76,52% yang ditunjang oleh kegiatan:
      1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 8 realisasi 5 dengan capaian kinerja kegiatan 62,50%

1.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum dari target 3 realisasi 2 dengan capaian kinerja kegiatan 66,66%

1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 3 realisasi 2 dengan capaian kinerja kegiatan 66,66%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 85% teralisai 84,76% dengan capaian kinerja program 98,55% yang ditunjang oleh kegiatan:

1.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 105 realisasi 89 capaian kinerja kegiatan 84,76%

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 80 % terealisai 72,72% dengan capaian kinerja program 88,68% yang ditunjang oleh kegiatan:

1.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 11 desa realisasi 8 desa capaian kinerja 72,72%

3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Program dan kegiatan yang menunjang penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum target 67% teralisai 49,50% dengan capaian kinerja program yang ditunjang oleh kegiatan :

1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dari terget 8 realisasi 6 dengan capaian kinerja kegiatan 75%

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 83% terealisasi 83% dengan capaian kinerja program 100% yang ditunjang oleh kegiatan :

1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari target 250 realisasi 250 capaian kinerja kegiatan 100%

Analisis realisasi output kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 12 dokumen dan terealisasi 7 dokumen. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Target 62 Dokumen dan Terealisasi 16 dokumen yaitu dokumen gaji, dokumen verifikasi keuangan SKPD dan laporan penyusulanan Laptri. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Target 51 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen saja. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Target 7 dokumen dan Realisasi 3 dokumen yaitu pembelian peralatan listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistic, bahan cetakan dan penggandaan, SPPD. Hal ini menunjukan kegiatan yang direncanakan di triwulan III ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Target 14 Unit dan terealisasi 6 unitt. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan target di triwulan III sudah dilaksanakan.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Target 24 Laporan dan Realisasi 7 laporan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air dan Listrik. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 12 Unit dan Realisasi 6 Unit yaitu terealisasi pembelian BBM, pemeliharaan Gedung kantor dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan target 8 laporan dan terealisasi 5 laporan, yaitu kegiatan rapat evaluasi pemasukan PBB-P2, Rapat UKS dan Rapat PUG.
9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum, dengan target 3 dokumen dan sampai saat ini sudah terealisasi 2 dokumen, yaitu laporan kegiatan rapat sarpras.
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan target 3 laporan dan terealisasi 2 laporan, yaitu kegiatan rapat lintas sektor.
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan target 105 lembaga kemasyarakatan dan terealisasi 89 lembaga kemasyarakatan, dikarenakan adanya musrenbang tingkat kecamatan dan kegiatan PKK.
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 laporan dan terealisasi 6 laporan, kegiatan rapat Linmas, Rapat Perguruan Silat dan Rapat dengan tokoh agama.
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 250 orang dan sudah diterealisasi 250 orang kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di triwulan II.
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan target 11 Desa, terealisasi 11 Desa itu dikarenakan adan kegiatan pembinaan keuangan desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam triwulan III belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga berpengaruh pada kinerja pada SKPD.

Adapun program dan kegiatan yang mempengaruhi/menunjang terhadap keberhasilan/kegagalan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 table diatas :

1. Sinergitas Kecamatan

   Program dan kegiatan yang menunjang ketercapaian nilai sinergitas keamatan dari target 77 terealisasi 84,44. Karena yang mendukung tercapainya sinergitas adalah semua program yang ada di dokumen DPA dan tercantum dalam perjanjian kinerja Camat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dengan target 92 terealisasi 96,41 Program dan kegiatan yang menunjang sararan pertama adalah:
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari target 73 teralisai 71 yang ditunjang oleh kegiatan:
      1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 12 terealisasi 11 dengan capaian kinerja kegiatan 91,66%
      1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 62 terealisasi 55 dengan capaian kinerja kegiatan 88,70%
      1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target 51 terealisasi 31 dengan capaian kinerja kegiatan 60,78%
      1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 7 terealisasi 7 dengan capaian kinerja kegiatan 100%
      1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 14 terealisasi 7 dengan capaian kinerja kegiatan 50%
      1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 24 terealisasi 24 dengan capaian kinerja kegiatan 100%
      1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 12 terealisasi 12 dengan capaian kinerja kegiatan 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target 84% teralisai 85,71% yang ditunjang oleh kegiatan:
    1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 8 realisasi 8 dengan capaian kinerja kegiatan 100%
    1.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum dari target 3 realisasi 2 dengan capaian kinerja kegiatan 66,66%
    1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 3 realisasi 2 dengan capaian kinerja kegiatan 66,66%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 85% teralisai 84% yang ditunjang oleh kegiatan:
    1.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 105 realisasi 102 capaian kinerja kegiatan 97,14%

4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Program dan kegiatan yang menunjang penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum target 67% teralisai 59% yang ditunjang oleh kegiatan :
    1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dari terget 8 realisasi 7 capaian kinerja kegiatan 87,50%
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 83% terealisasi 100% yang ditunjang oleh kegiatan :
    1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari target 250 realisasi 250 capaian kinerja kegiatan 100%

5. Meningkatnya tertib Administrasi Desa dengan target 100% terealisasi 81,18% dengan capaian 18,18%
    1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 80 % teralisai 80% yang ditunjang oleh kegiatan:

1.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 11 desa realisasi 11 desa capaian kinerja 100%

Analisis realisasi output kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 4 (empat) dokumen dan belum terealisasi. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Target 62 (enam puluh dua) Dokumen dan Terealisasi 1 (satu) dokumen yaitu Gaji. Hal ini menunjukan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Target 51 (lima puluh satu) Dokumen dan belum terealisasi. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Target 7 (tujuh) dokumen dan Realisasi 3 (tiga) dokumen yaitu pembelian peralatan listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistic, bahan cetakan dan penggandaan, SPPD. Hal ini menunjukan kegiatan yang direncanakan di triwulan III ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Target 14 (empat belas) Unit dan belum terealisasi. Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target di triwulan 1 dan pada triwulan II juga belum dilaksanakan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Target 24 (dua puluh empat) Laporan dan Realisasi 3 (tiga) laporan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air dan Listrik. Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 12 (delapan belas) Unit dan Realisasi 2 (satu) Unit yaitu terealisasi pembelian BBM saja dan pemeliharaan Gedung kantor.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan target 8 (delapan) laporan dan terealisasi hanya 1 (satu) laporan, yaitu kegiatan rapat PUG.
9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum, dengan target 3 (tiga) dokumen dan sampai saat ini belum terealisasi karena kegiatan tersebut di triwulan II.
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan target 3 (tiga) laporan dan belum terealisasi karena kegiatan tersebut berada di triwulan II.
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan target 97 lembaga kemasyarakatan dan terealisasi 85 lembaga kemasyarakatan, dikarenakan adanya musrenbang tingkat kecamatan.
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 laporan dan terealisasi, kegiatan terebut dilaksanakan pada triwulan II.
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 250 orang dan sudah diterealisasi 2500 orang kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di triwulan II.
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan target 11 Desa, terealisasi 11 Desa itu dikarenakan adan kegiatan pembinaan keuangan desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Patianrowo pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu semula Rp3.412.866.292,00 dengan realisasi sebesar Rp2.172.485.470,00 sisa anggaran Rp1.240.380.822,00 atau dengan capaian sebesar 63,46%.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.181.781.992**	**1.952.800.770**	**1.228.981.222**	**61,37%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***8.436.000***	***7.594.800***	***841.200***	***90,03%***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.268.000	1.933.500	334.500	85,25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.982.000	2.911.500	70.500	97,64%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.186.000	2.749.800	436.200	86,31%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.636.518.992**	**1.448.268.061**	**1.188.250.931**	**54,93%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.630.902.992	1.443.167.161	1.187.735.831	54,85%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.635.000	1.317.900	317.100	80,61%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.205.000	2.197.500	717.500	99,66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.776.000	1.585.5000	190.500	89,27%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.933.000**	**9.626.000**	**1.307.000**	**88,05%**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.283.000	6.865.000	418.000	94,26%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bersadarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.650.000	2.761.000	889.000	75,64%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***126.401.650***	***122.703.260***	***3.698.390***	***97,07%***

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.664.600	33.601.500	63.100	99,81%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.288.000	11.660.000	1.628.000	87,75%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.695.550	46.344.760	350.790	99,25%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.737.500	13.500.000	1.237.500	91,60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000	5.016.000	184.000	96,46%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.816.000	10.645.000	171.000	98,42%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.936.000	64.000	96,80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***88.230.700***	***84.921.000***	***3.309.700***	***96,25%***
	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.230.700	84.921.000	3.309.700	96,25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***113.150.000***	***90.861.036***	***22.288.964***	***80,30%***
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.900.000	76.900.000	12.000.000	86,50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.250.000	13.961.036	10.288.964	57,57%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***198.111.650***	***188.826.613***	***9.285.037***	***95,31%***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.185.650	41.472.000	2.713.650	93,86%
	Pemeliharaan Mebel	9.250.000	9.200.000	50.000	99,46%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000	6.030.000	170.000	97,26%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.476.000	132.124.613	6.351.387	95,41%
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**52.921.700**	**50.091.000**	**2.830.700**	**94,65%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***41.398.350***	***40.034.000***	***1.364.250***	***96,70%***
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.398.350	40.034.000	1.364.250	96,70%

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***4.249.450***	***3.110.000***	***1.139.450***	***73,19%***
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.249.450	3.110.000	1.139.450	73,19%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***7.273.900***	***6.947.000***	***326.900***	***95,51%***
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.273.900	6.947.000	326.900	95,51%
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**44.619.750**	**40.732.000**	**3.887.750**	**91,29%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***44.619.750***	***40.732.000***	***3.887.750***	***91,29%***
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.198.350	20.445.000	1.753.350	92,10%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22.421.400	20.287.000	2.134.400	90,48%
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**36.348.350**	**35.539.500**	**808.850**	**97,77%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***36.348.350***	***35.539.500***	***808.850***	***97,77%***
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.023.350	22.614.500	408.850	98,22%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.325.000	12.925.000	400.000	97,00%
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**53.319.500**	**52.350.000**	**969.350**	**98,18%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***53.319.500***	***52.350.000***	***969.350***	***98,18%***

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.319.500	52.350.000	969.350	98,18%
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**43.875.000**	**40.972.200**	**2.902.800**	**93,38%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***43.875.000***	***40.972.200***	***2.902.800***	***93,38%***
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	38.225.000	36.418.200	1.806.800	95,27%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.650.000	4.554.000	1.096.000	80,60%
JUMLAH KESELURUHAN		**3.412.866.292**	**2.172.485.470**	**1.240.380.822**	**63,46%**

Adapun penyebab tidak dapat terserap atau terlaksananya kegiatan sehingga menyebabkan sisa anggaran tersebut diatas :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp3.181.781.992,00 terealisasi sebesar Rp1.952.800.770,00 atau 63,37%. Program ini digunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp52.921.700,00 terealisasi sebesar Rp50.091.000,00 atau 94,10%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran Rp44.619.750,00 dengan realisasi sebesar Rp40.732.00,00 atau 91,29%

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp36.348.350,00 terealisasi sebesar Rp29.267.000,00 atau 80,52%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Paraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp53.319.500,00 terealisasi sebesar Rp52.350.000,00 atau 98,18%. Program ini digunakan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan anggaran sebesar Rp43.875.000,00 untuk di gunakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan teralisasi sebesar Rp40.972.200,00 atau 96,60%. Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kecamatan Patianrowo pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu semula Rp3.412.866.292,00 dengan realisasi sebesar Rp2.172.195.470,00 sisa anggaran Rp1.240.380.822,00 atau dengan capaian sebesar 63,46%.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2025 dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan dan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun faktor penyebab keberhasilan target kinerja antara lain :

a. Keberhasilan capaian kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan instansi vertikal. Kerjasama tersebut berupa koordinasi, baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya
   Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Forpimcam, Korwil, UPT, Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan desa/kelurahan.
c. Pemberdayaan potensi sumber daya yang ada seoptimal mungkin, sehingga target kinerja dapat tercapai;

Faktor kegagalan dalam penyerapan anggaran adalah :

a. Serapan anggaran pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan dikarena dikarenakan ada kekosongan jabatan dan pension.
b. Masih terdapat kekosongan 3 (tiga) pejabat struktural sehingga untuk serapan anggaran tidak maksimal dan realisasi kinerja kurang maksimal.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Patianrowo dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, namun tidak semua indikator dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun ada satu indikator dari sasaran yang dapat memenuhi target.

Akan tetapi, secara umum capaian kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
Renstra 2024-2026					
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	92	96,58	104,97%

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10%	33,33%	333,3%
Renstra 2025-2029					
	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	77	84,44	92,33%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92	96,41	104,79%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	10%	33,33%	333,3%
3	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	100%	81,18%	81,18%

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan Patianrowo telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2024-2026 semua indikator belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada triwulan III Tahun 2025. Namun pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2025-2029 dari 1 tujuan dan 3 sasaran sudah memenuhi target, hanya ada 1 sasaran yang tidak memehuni target.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
   Indikator : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
3. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa
   Indikator : Persentase Desa tertib administrasi desa

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaanprogram/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Patianrowo secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna,

oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Patianrowo, 05 Maret 2025

CAMAT PATIANROWO

[illegible]I HATMANTO WIBOWO, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19790908 201101 1 004

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2024-2026 DAN RENSTRA 2025-2029

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 (Renstra 2025-2029)
   https://drive.google.com/drive/folders/16L0bA6EK0aoChJ3kJ-raubL7AqDJ1tA6?usp=sharing
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
   https://drive.google.com/drive/folders/1X5XM9H1g1Uvgx--DzeIa5--MK9W9ncXs?usp=drive_link
3. Dokumen Penganggran /DPA/DPPA Tahun 2025
   https://drive.google.com/drive/folders/16sU3kp9H-IfsGUPALOmq8-zNh1WWa4G_?usp=drive_link
4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapaianya kinerja/ outcame OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Terget 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	92	96,58	104,97	https://drive.google.com/drive/folders/1SAwhRoFuYEX7ZR_4yXGS-W86N0KnX-Fo?usp=sharing
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		10	33,33%	333,3%	https://drive.google.com/drive/folders/1oeqJAFGuYQD547lPCRHuqcPqlPeW4EPs?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan		**73**	**71,00**	**97,26**	https://drive.google.com/drive/folders/1m8kJRf0Dt4dUQOxDizDmslsnhfgZiuTy?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan*		*12 Dokumen*	*7 Dokumen*	*58,33%*	https://drive.google.com/drive/folders/1ErqjWtejDEVeavYsPe

	Perangkat Daerah	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*					f0QdHd_tkXd08W?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*62 Dokumen*	*27 Dokumen*	43,54%	https://drive.google.com/drive/folders/14xK8qQhcIjGO22tXRhWxGz-p3CY3VPti?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*51 Dokumen*	*1 Dokumen*	*5,26%*	https://drive.google.com/drive/folders/1E0wFLjDARM_CgTzo0cI8HeqcCVXWmJhh?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*7 Dokumen*	*7 Dokumen*	*100%*	https://drive.google.com/drive/folders/1LlCkF8ZVCjbVNvxgOBmTj4Es_D2Dtl57?usp=drive_link
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*		*14 Unit*	*6 unit*	*62,85%*	https://drive.google.com/drive/folders/11JRMs02SpVHaMbhxorhXeOf8q95s1Ito?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*		*24 Laporan*	*13 Laporan*	*54.16%*	https://drive.google.com/drive/folders/19WshPQbKY-nFVNbDDq7HFu-0nkxU7Gwd?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*		*12 Unit*	*4 unit*	*33,33%*	https://drive.google.com/drive/folders/1B3BeTQvQ1uWoFxZYdP6_NTK-y7wvx2Q6?usp=drive_link

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***		84%	9,52%	11,33%	https://drive.google.com/drive/folders/11bN3_NkmkhE2TADVQ-yWd5UCqZLlUF2Y?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*8 Laporan*	5 Laporan	62,50%	https://drive.google.com/drive/folders/1HiLOiMz8GAqXG98vn3pdmJNVKVWuvqwm?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*3 Dokumen*	2 Dokumen	75%	https://drive.google.com/drive/folders/1gh_1NbQt9SzuJkXipWvnLovtcHzLItfV?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*3 Laporan*	*2 Laporan*	*75%*	https://drive.google.com/drive/folders/1ICxwLLFU8SLhPbzXsMBBNQ2ZpfUWgFeL?usp=sharing
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**		86%	86%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fdxcx4KwQCulwk7g9mm_c9dB4RL-Xnhg?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*		*105 Lembaga Kemasyarakatan*	*105 Lembaga Kemasyarakatan*	*100%*	https://drive.google.com/drive/folders/165LjzkXoFbSBtgTE5VDY-bQpE5X-bJkh?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**		67%	75%	87,50%	https://drive.google.com/drive/folders/1SmDzYAaLWym3IND_HnLuchm6EpxUGQpM?usp=sharing

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*8 Laporan*	*6 Laporan*	75%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fd_RVOxcT4EX5DcVzoLKACB7dW5Z0Z8h?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**		83%	83%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1-i23l_cddbcWVZrXQgShPENTGIQfD0sD?usp=sharing
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*		*250 Orang*	*250 orang*	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Oe5h1HHhz8QvYxQNdol56BRDbsTdwZJQ?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**		82%	0%	0%	Belum ada Capaian
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*		*11 Desa*	0 Desa	*0%*	Belum ada Capaian
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	77	84,44		https://drive.google.com/drive/folders/1j70FACIDfo0XxWg0qrnGolq5boCelw1s?usp=sharing
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	92	96,41	104,79%	https://drive.google.com/drive/folders/1Eg-qDtB16whporSumgwJ2lBBNNOM5pKj?usp=sharing
	Meningkatnya	Persentase pen urunan gangguan	Renstra 2025-2029	10%	33,33%	333,3%	https://drive.google.

	Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum					com/drive/folders/1oeqJAFGuYQD547lPCRHuqcPqlPeW4EPs?usp=sharing
	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	100%	81,18%	81,18%	https://drive.google.com/drive/folders/1TlGz5EWP-MQ5pz1GDB4ALEwPUF5wnTEo?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan		**73**	**71,00**	**97,26**	https://drive.google.com/drive/folders/1m8kJRf0Dt4dUQOxDizDmslsnhfgZiuTy?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikthisar OPD yang diaksanakan*		*12 Dokumen*	11 Dokumen	91,66%	https://drive.google.com/drive/folders/1ErqjWtejDEVeavYsPef0QdHd_tkXd08W?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD*		*62 Dokumen*	55 Dokumen	88,70%	https://drive.google.com/drive/folders/14xK8qQhcIjGO22tXRhWxGz-p3CY3VPti?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*		*51 Dokumen*	32 Dokumen	62,74%	https://drive.google.com/drive/folders/1E0wFLjDARM_CgTzo0cI8HeqcCVXWmJhh?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum SKPD*		*7 Dokumen*	7 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LlCkF8ZVCjbVNvxgOBmTj4Es_D2Dtl57?usp=drive_link

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Dearah*		*14 Unit*	7	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1lJRMs02SpVHaMbhxorhXeOf8q95s1Ito?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		*24 Laporan*	24	100%	https://drive.google.com/drive/folders/19WshPQbKY-nFVNbDDq7HFu-0nkxU7Gwd?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharan Sarana dan Prasarana Barang Milik daerah*		*12 Unit*	12 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1B3BeTQvQ1uWoFxZYdP6_NTK-y7wvx2Q6?usp=drive_link
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**		84%	75%	89,28%	https://drive.google.com/drive/folders/11bN3_NkmkhE2TADVQ-yWd5UCqZLlUF2Y?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*8 Laporan*	8	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1HiLOiMz8GAqXG98vn3pdmJNVKVWuvqwm?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*3 Dokumen*	2	66,66%	https://drive.google.com/drive/folders/1gh_1NbQt9SzuJkXipWvnLovtcHzLItfV?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada*		*3 Laporan*	2	66,66%	https://drive.google.com/drive/folders/1ICxwLLFU8SLhPbzXsMBBNQ2ZpfUWgFeL

		Camat					?usp=sharing
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**		86%	97,14%	112,96%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fdxcx4KwQCulwk7g9mm_c9dB4RL-Xnhg?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan		*105 Lembaga Kemasyarakatan*	102	97,14%	https://drive.google.com/drive/folders/165LjzkXoFbSBtgTE5VDY-bQpE5X-bJkh?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**		67%	87,50%	130,59%	https://drive.google.com/drive/folders/1SmDzYAaLWym3IND_HnLuchm6EpxUGQpM?usp=sharing
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*8 Laporan*	7	87,50%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fd_RVOxcT4EX5DcVzoLKACB7dW5Z0Z8h?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**		83%	100%	120,48%	https://drive.google.com/drive/folders/1-i23l_cddbcWVZrXQgShPENTGIQfD0sD?usp=sharing
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		*250 Orang*	250	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Oe5h1HHhz8QvYxQNdol56BRDbsTdwZJQ?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat**		82%	81,18%	81,18%	https://drive.google.com/drive/folders/1

	PEMERINTAHAN DESA	**Berkembang**					Aw9Gxwf2vLXrJ8eqapaLTuI6ZhSBLmQk?usp=sharing
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang		*11 Desa*	9 Desa	81,18%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZM5LmS3FSQNAildHStTj-wVFCzoPC-cu?usp=sharing